



KPU Gandeng PPS dan PPK

Jadikan Yogya Sebagai Barometer Demokrasi Nasional

YOGYAKARTA – KPU Kota Yogyakarta menggandeng para penyelenggara pemilu di wilayah kelurahan dan kecamatan untuk menjaga kualitas pemungutan suara pada 9 April mendatang.

Kemarin, anggota Panitia Pemilu Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) diajak KPU untuk menandatangani Pakta Integritas di Balai Kota Yogyakarta. Ketua KPU Yogyakarta Wawan Budianto mengatakan, pakta integritas yang dilakukan bersama memiliki tujuan agar kualitas demokrasi di Yogyakarta menjadi barometer nasional. "Pemilu di Yogyakarta harus bisa terus dijadikan sebagai barometer nasional," kata Wawan.

Salah satu bukti pemilu sebagai ajang demokrasi di Yogyakarta layak menjadi barometer nasional adalah pelaksanaan pemilihan kepala daerah pada 2011 lalu. Pelaksanaan pilkada tersebut tercatat menjadi agenda demokrasi yang tidak sampai dibawa ke Mahkamah Konstitusi atau MK.

Dengan pakta integritas, Wawan menjamin, para pelaksana pemilu di wilayah akan menjaga kualitas pelaksanaan pemilu. Hal itu dikarenakan dalam kesepakatan bersama tersebut dinyatakan siap menghadapi sanksi jika ada pelanggaran terhadap pakta integritas. "Kami semua tidak akan terlena dengan berbagai godaan. Jika ada penyelenggara pemilu yang melanggar maka harus siap dengan sanksi moral dan administrasi," kata Wawan.

Penandatanganan pakta integritas pelaksanaan pemilu legislatif di Balai Kota Yogyakarta dihadiri ratusan warga Yogyakarta. Tidak hanya diikuti oleh anggota PPS dan PPK tetapi juga didatangi perwakilan pengurus Rukun Warga (RW), pengurus partai politik dan sejumlah birokrat Pemkot Yogyakarta.

Tampak hadir pula dalam kesempatan tersebut jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah seperti Kapolresta Yogyakarta dan Dandim 0734 Yogyakarta. Anggota Forkompinda ikut menandatangani pakta integritas dan dukungan pelaksanaan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil di poster khusus yang disiapkan KPU Yogyakarta.

Komisioner bidang Pendidikan Pemilih dan Humas KPU Yogyakarta Sri Surani mengatakan, agenda pakta integritas yang diselenggarakan merupakan agenda nasional. KPU di se-

mua daerah juga menyelenggarakan agenda tersebut dengan dibalut acara jalan santai.

"KPU berharap kehadiran masyarakat pada 9 April di Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Yogyakarta mencapai 70%," kata dia. Target tersebut meniadakan tidak mudah karena adanya tren penurunan partisipasi dalam pemilihan masih terus terjadi.

Pada Pilkada 2011 Kota Yogyakarta tingkat partisipasinya hanya 64,5%. Sementara sebelumnya pada pemilu legislatif 2009 partisipasi mencapai 69%. "Kami berharap peserta pemilu bisa mendapatkan kepercayaan dari masyarakat," kata Rani.

● **maha deva**

Instansi	Tindak Lanjut
1.	<input type="checkbox"/> Untuk Ditan
2.	<input type="checkbox"/> Untuk Diket
3.	<input type="checkbox"/> Jumpa Pers
4.	
5.	

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sekretariat Komisi Pemilihan U	Positif	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 06 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005